

MENGURAI KONFLIK AGAMA DAN KITAB SUCI

Tinjauan Teologis, Historis dan Arkeologis



TAUFIK HIDAYAT, DKK



Mengurai Konflik
AGAMA DAN KITAB SUCI
Tinjauan Teologis, Historis dan Arkeologis

Taufik Hidayat, dkk

MENGURAI KONFLIK AGAMA DAN KITAB SUCI

Tinjauan Teologis, Historis dan Arkeologis

Penulis : Taufik Hidayat, dkk
Editor : Mohammad Hairul
Penyunting : Suheri

ISBN : 978-623-6894-29-3

Copyright © Februari 2021

Ukuran: 14 cm X 20 cm; Hal: xii + 406

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Pertama kali diterbitkan di Indonesia dalam Bahasa Indonesia oleh Penerbit LICENSI. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Penata Isi : Ahdari
Cover : Sofyan Maliki

Cetakan I, Februari 2021

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit LICENSI Jalan Letnan Rantam RT. 016 RW. 004 Poncogati, Curahdami, Bondowoso-Jawa Timur
Telp: +6282336053336, +6285236555520

Email : penerbitlicensi@gmail.com Web: www.penerbitlicensi.com

Didistribusikan oleh CV. LICENSI (Library Centre Indonesia) Jalan Letnan Rantam RT. 016 RW. 004 Poncogati, Curahdami, Bondowoso-Jawa Timur
Telp: +6282336053336, +6285236555520

Email: penerbitlicensi@gmail.com



“Buku bunga rampai ini mengulas tentang konflik dan kekerasan berdimensi etnis-agama dari berbagai pendekatan dan sudut pandang. Selain itu, buku ini juga menawarkan solusi hidup berdampingan secara damai dan toleran dalam masyarakat plural. Kehadiran buku ini sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia yang tak pernah sepi dari konflik, intoleransi, dan permusuhan antar/intra-kelompok agama maupun etnis.”

Prof. Sumanto Al Qurtuby, Ph.D.

Direktur Nusantara Institute dan
dosen King Fahd University, Arab Saudi



DAFTAR ISI

Sentralisasi Ibrahim dalam Mewudujkan Relasi Damai Kristen dan Islam.....	1
❖ Leonardo Winarto	
Mengurai Polemik Penyaliban Yesus dalam Islam dan Kristen: Tinjauan Teologis dan Historis.....	19
❖ Taufik Hidayat	
Kritik Al-Qur'an Terhadap Kristen dan Akar Polemiknya.....	55
❖ Taufik Hidayat	
Mengurai Konflik Agama di Negara Bangsa.....	73
❖ Khairil Akbar	
Umat Beragama dan Kewargaan Illiberal.....	89
❖ Sehat Ihsan Shadiqin	
Dualitas Toleransi dan Intoleransi.....	97
❖ Gratia Victory, A.P.	
Ancaman Otoritarianisme dan Indiosinkrasi Elit Agama dalam Relasi Muslim Kristiani di Indonesia.....	103
❖ Muhammad Muchlish Huda	
Tionghoa di Persimpangan: Mengurai Konflik Beragama Bernuansa Etnis.....	115
❖ Nyoto	

Pendidikan Multikultural Berbasis Literasi Kewargaan (Alternatif Solusi Menangkal Konflik Agama-Agama)	129
❖ Mohammad Hairul	
Toleransi Beragama dalam Perspektif Islam	149
❖ Abdul Wasik	
Agama dan Sains, Selaras atau Bertentangan?	167
❖ Agung Nugroho Catur Saputro	
Islam dan Hindu Nusantara: Refleksi Agama Manusia Indonesia	183
❖ Muhammad Alwi HS	
Dialektika Agama dan Budaya: Upaya Mengurai Konflik Teologis.....	195
❖ Athik Hidayatul Ummah	
Menyoal <i>Truth Claim</i> dan Membangun Konsep Toleransi dari Agama-Agama	211
❖ Ahmad Zainuri	
Teologi Pluralisme: Upaya Mencegah Konflik Komunal di Tengah Masyarakat Multi Agama di Indonesia	219
❖ Abdul Khakim	
Mengelola Keragaman, Tumbuhkan Perdamaian	233
❖ Ahmad Rifa'i	

Sikap Toleransi Antarumat Hindu-Islam di Bali dalam Mencegah Konflik Komunal	243
❖ Siti Yumnah	
Totalitas Beragama Untuk Mewujudkan Kerukunan Umat.....	257
❖ Siti Rohmatul Ummah	
Konflik Agama dan Kitab Suci: Memahami, Mencegah dan Mengelolanya.....	269
❖ Husin Sutanto	
Benarkah Semua Golongan Yahudi dan Nasrani Benci Terhadap Umat Islam?	281
❖ Afrizal El Adzim Syahputra	
Indahnya Perbedaan	289
❖ Tatag Setyawan	
Pandangan Islam Terhadap Konflik Teologi Agama	295
❖ Moh. Nasiruddin	
Agama Itu Substansi, Perdamaian Merupakan Esensi	305
❖ Sifaul Amin	

Sejarah dan Keyakinan Islam di Mata Seorang Kristen	325
❖ Yeheskiel Obehetan	
Toleransi dan Antisipasi Konflik Beragama di Gunung Anjasmoro.....	353
❖ Mukani	
Konflik Sosial Pemicu Lahirnya Konflik Agama	363
❖ Astrizal	
Piagam Madinah: Spirit Toleransi Mengurai Konflik.....	373
❖ Milla Apologia	
Biografi Penulis.....	381



UMAT BERAGAMA DAN KEWARGAAN ILLIBERAL

Oleh : Sehat Ihsan Shadiqin

Indonesia adalah negara dengan penduduk yang plural. Setiap warga negara memiliki hak yang sama di manapun ia berada yang dilindungi oleh undang-undang. Hal ini sudah diatur sedemikian rupa oleh pendiri bangsa ini karena mereka sangat yakin hak melaksanakan keberagaman inilah yang nantinya akan menjadi pondasi kuat dalam pembangunan bangsa. Jika keberagaman dianggap sebagai sebuah ancaman, maka bangsa ini sudah lama hancur dan terus menerus dalam konflik. Bahkan ulama Islam yang mayoritas dalam proses awal merumuskan prinsip negara juga memberikan ruang yang terbuka kepada semua agama untuk hidup di Indonesia. Mereka sudah sangat yakin bahwa pluralitas di masa yang akan datang akan menjadi fondasi kokoh kesatuan bangsa.

Salah satu keberagaman yang ada di Indonesia adalah keberagaman agama. Pada masa Presiden Suharto, keberagaman agama dibatasi hanya dalam lima agama saja; Islam, Katolik, Kristen, Budha, dan Hindu. Masyarakat Indonesia yang berada di luar lima agama tersebut wajib memilih atau mengakui salah satu dari agama yang lima. Hal ini telah menyebabkan banyak penghayat kepercayaan lokal terpaksa memilih agama tertentu yang padahal ia sama sekali tidak memiliki niat untuk menjadi umat agama tersebut. Para penganut kepercayaan lokal, tidak mungkin bertahan dengan kepercayaannya karena akan menghadapi masalah administrasi kependudukan. Pada era reformasi hal ini sudah berubah, di mana pengahayat kepercayaan juga diberikan ruang untuk menunjukkan identitas kewargaannya dan diakui dalam administrasi kependudukan. Namun ketika ada seseorang atau

sekelompok orang yang di satu sisi memiliki kebebasan tersebut namun disisi lain mendapatkan pembatasan-pembatasan hak, maka ia disebut dengan Kewargaan yang illiberal yakni Kewargaan yang mendapatkan pembatasan beberapa hak asasinya. Pembatasan ini terjadi bisa jadi karena relasi yang tidak setara antara dia dengan kekuasaan atau dengan lingkungan di sekitarnya.

Kondisi masyarakat indonesia yang beragam ini harusnya dijaga agar tidak menjadi sumber konflik. Hal ini dilakukan dengan memberikan ruang yang bebas kepada semua penganut agama untuk melaksanakan ajaran agamanya dan tidak menuntut orang lain melaksanakan atau mengikuti agama yang ia anut. Kejadian di Padang awal tahun 2021 di mana ada sekolah mewajibkan siswi Kristen mengenakan jilbab karena mayoritas di sana adalah muslim adalah kebijakan yang salah. Tidak ada logika hukum dalam negara demokrasi yang membenarkan tindakan demikian. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam mengekspresikan keyakinan agamanya secara bebas. Sebab prinsip kewargaan dalam negara demokrasi adalah "liberal" di mana setiap orang memiliki hak yang sama di bawah satu hukum.

Diskriminasi Berbasis Mayoritas

Kebanyakan diskriminasi keagamaan yang terjadi di Indonesia selama ini adalah diskriminasi atas nama mayoritas. Di daerah dengan mayoritas Muslim maka aturan yang diterapkan juga berdasarkan standar-standar bagi Muslim. Demikian juga dengan daerah dengan mayoritas Kristen, yang

menerapkan aturan berbasis Kristen. Aturan demikian sering diterapkan dengan alasan yang sangat keliru dalam memahami pepatah lama “dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung.” Padahal hal ini berlaku untuk prinsip-prinsip budaya dan sosial agar tidak terjadi konflik. Sementara prinsip agama adalah keyakinan asasi yang tidak bisa disesuaikan karena adat mayoritas.

Oleh karena itu apa yang dilakukan kelompok mayoritas tersebut bukan berbasis sepenuhnya berbasis pada ajaran agama melainkan hanya semangat mengamalkan ajaran agama yang keliru. Sebab dalam prinsip paling asasi agama tidak ada pemaksaan yang harus dilakukan oleh sebuah agama kepada agama yang lain untuk menjalankan ajaran agama tersebut. Artinya tidak ada ajaran agama apapun yang mencoba memaksakan orang lain melaksanakan ajaran agamanya sementara dia bukan penganut agama sebut.

Dalam Islam misalnya Rasulullah telah mencontohkan betapa ia menghormati keberagaman agama dalam satu wilayah dan memberikan hak kepada mereka untuk menjalankan ajaran agamanya meskipun dia berada di bawah kepemimpinan Rasulullah. Catatan para sarjana mengenai perjanjian Madinah atau kita sebut dengan Piagam Madinah dengan jelas menunjukkan betapa pemimpin umat Islam ini memberikan ruang yang sangat bebas kepada pemeluk agama yang lain untuk melaksanakan ajaran agamanya. Ini adalah bentuk ekspresi paling asasi dalam Islam dalam menghargai ajaran agama yang berbeda. Kita tetap bisa hidup bersama dalam sebuah negara, provinsi bahkan keluarga dengan

beragama cara pandangan agama. Karena keberagaman pemahaman keagamaan itu sendiri adalah ciptaan Tuhan (sunnatullah) yang tidak dapat diubah oleh manusia.

Saya justru menduga semangat beragama yang keliru ini dikompromi oleh politisi atau bahkan agamawan yang menginginkan kedudukan politik. Ia menggunakan semangat emosional tokoh atau umat beragama untuk “berbuat lebih” bagi agamanya bahkan dengan melanggar nilai-nilai sosial yang harusnya dijaga. Bagi politisi dengan mencitrakan diri sebagai penganut agama yang ta’at, ia akan memperoleh kesempatan mendapatkan suara dalam sebuah pemilihan umum. Oleh sebab itu dengan menggunakan isu agama ia kerap kali emancing ataupun mendorong umat beragama melakukan usaha hadirkan praktik agama di ruang publik. Bahkan terkadang dengan tidak lagi memperdulikan prinsip-prinsip dasar dari agama yang dianut oleh umat beragama. Bagi saya dalam posisi seperti ini umat beragama telah menjadi korban politisir yang dilakukan oleh politisi sehingga bukan suatu hal yang patut dibanggakan sebagai keberhasilan dalam menerapkan ajaran agama.

Mengembalikan Prinsip Kewarganegaraan

Di sinilah menurut saya penting mengembalikan prinsip kewarganegaraan ke ruang publik. Setiap masyarakat harus menghargai dan memiliki pandangan yang sama tentang prinsip semua orang di bawah payung hukum negara memiliki hak yang sama dalam menjalankan agamanya. Tidak ada yang boleh dipaksakan melakukan atau mengamalkan ajaran agama

yang berbeda dengan apa yang dia yakini. Pada prinsip-prinsip yang sangat krusial memaksakan orang untuk mengamalkan ajaran agama adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan bahkan mencederai hubungan yang baik antar umat beragama. Untuk jangka panjang hal ini juga dapat menjadi awal bagi munculnya permusuhan di kalangan umat.

Prinsip kewarganegaraan yang setara tersebut mengharuskan kita semua memberikan ruang kepada umat beragama untuk mengekspresikan keagamaannya tanpa harus merasa tersaingi apapun ataupun takut dari ekspresi tersebut. Semua umat beragama tentu saja memiliki prinsip yang kuat atas ajaran agamanya dan tidak akan mengubah prinsip tersebut hanya dengan melihat orang lain melaksanakan ajaran agama. Tuhan tidak akan mencatat dosa atas perilaku mengizinkan orang lain melaksanakan ajaran agamanya bahkan bisa jadi itu sebuah kebajikan karena kita telah mempermudah urusan orang lain berbuat baik.

Saya melihat dari catatan sejarah secara sosial umat beragama di Indonesia hidup rukun dan membangun relasi yang baik. Di berbagai daerah dengan mudah kita menemukan satu kampung dengan beberapa kepercayaan. Hal ini menunjukkan betapa umat beragama di Indonesia dapat tinggal di suatu tempat tanpa saling mencela dan memusuhi. Namun tatkala seorang politisi datang dan dia hendak mendapatkan suara yang lebih banyak dari satu komunitas, dia akan memprovokasi pemahaman paling mendasar dari umat beragama dan mendorong pemahaman tersebut di ekspresikan di ruang publik. Alih-alih membangun kedamaian

sebagai prinsip penting ajaran agama, kondisi ini bisa menjadi sebuah api dalam sekam yang nantinya membakar pluralitas yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia.



QUALITAS TOLERANSI DAN ISTILERANSI

Das. Gana Yudi, A.P.